



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 329 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Instansi Pemerintah;

b. bahwa dalam upaya untuk penyelesaian penataan non-ASN di Instansi Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024; dan
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 290 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Nasional Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan

- : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-250/MK.02/2024 tanggal 18 Maret 2024;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Instansi Pemerintah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.
- KETIGA : Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut, dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Instansi Pemerintah.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 2 Agustus 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
A .	GURU	140	
1.	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	20	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	2	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	5	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6.	GURU AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	3	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7.	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8.	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPS	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9.	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-SD	77	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10.	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-TK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
11.	GURU AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	6	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
12.	GURU AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	12	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
13.	GURU AHLI PERTAMA - GURU PPKN	4	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
14.	GURU AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
15.	GURU AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	2	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
16.	GURU AHLI PERTAMA - GURU TIK	3	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
B .	TENAGA KESEHATAN	100	
1.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BAOLAN
2.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOPIDO BIDANG PELAYANAN
3.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM HJ. ZUBAIDAH BANTILAN BIDANG PENUNJANG MEDIS
4.	BIDAN AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOPIDO BIDANG PELAYANAN
5.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS LAULALANG
6.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KOTA
7.	BIDAN AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM HJ. ZUBAIDAH BANTILAN BIDANG PELAYANAN
8.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BANGKIR
9.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BINONTOAN
10.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS DONDO
11.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KAYULOMPA
12.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS OGOTUA
13.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KOMBO
14.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS GALANG
15.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BASIDONDO
16.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BINONTOAN
17.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SALUMBIA
18.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS OGODEIDE
19.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS LAULALANG
20.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS OGOTUA
21.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BANGKIR
22.	BIDAN TERAMPIL	5	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOPIDO BIDANG PELAYANAN
23.	BIDAN TERAMPIL	5	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM HJ. ZUBAIDAH BANTILAN BIDANG PELAYANAN
24.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS DAKOPEMEAN
25.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KOMBO
26.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOPIDO BIDANG PELAYANAN
27.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM HJ. ZUBAIDAH BANTILAN BIDANG PELAYANAN
28.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS GALANG
29.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
30.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KOTA
31.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM HJ. ZUBAIDAH BANTILAN BIDANG PENUNJANG MEDIS
32.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS OGODEIDE
33.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BAOLAN
34.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS DONDO
35.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM HJ. ZUBAIDAH BANTILAN BIDANG PELAYANAN
36.	PERAWAT AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOPIDO BIDANG PELAYANAN

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
37.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BINONTOAN
38.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS GALANG
39.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SALUMBIA
40.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS LAULALANG
41.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS LAMPASIO
42.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KAYULOMPA
43.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS DAKOPEMEAN
44.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KOMBO
45.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BASIDONDO
46.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BANGKIR
47.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BANGKIR
48.	PERAWAT TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS OGODEIDE
49.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KOMBO
50.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BINONTOAN
51.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS OGOTUA
52.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS DONDO
53.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS LAULALANG
54.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS GALANG
55.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KAYULOMPA
56.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SALUMBIA
57.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BASIDONDO
58.	PERAWAT TERAMPIL	5	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM HJ. ZUBAIDAH BANTILAN BIDANG PELAYANAN
59.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS DAKOPEMEAN
60.	PERAWAT TERAMPIL	5	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOPIDO BIDANG PELAYANAN
61.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOPIDO BIDANG PENUNJANG MEDIS
62.	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOPIDO BIDANG PENUNJANG MEDIS
63.	RADIOGRAFER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM HJ. ZUBAIDAH BANTILAN BIDANG PENUNJANG MEDIS
64.	RADIOGRAFER TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOPIDO BIDANG PENUNJANG MEDIS
65.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS LAULALANG
66.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS LAMPASIO
67.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS DONDO
68.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS OGODEIDE
69.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS OGODEIDE

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
C .	TENAGA TEKNIS		150	
1.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI BADAN PENDAPATAN DAERAH UPT PENDAPATAN DAERAH WILAYAH II
2.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI BADAN PENDAPATAN DAERAH UPT PENDAPATAN DAERAH WILAYAH I
3.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG SUMBER DAYA AIR
4.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI BADAN PENDAPATAN DAERAH UPT PENDAPATAN DAERAH WILAYAH V
5.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG BINA MARGA
6.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI BADAN PENDAPATAN DAERAH UPT PENDAPATAN DAERAH WILAYAH III
7.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI BADAN PENDAPATAN DAERAH UPT PENDAPATAN DAERAH WILAYAH IV
8.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
9.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIAT
10.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH
11.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA SEKRETARIAT
12.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 TEKNIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
13.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	2	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
14.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT
15.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 PERTANIAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
16.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
17.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	2	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT
18.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SEKRETARIAT
19.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
		PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI		
20.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	2	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT
21.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KETAHANAN PANGAN SEKRETARIAT
22.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKRETARIAT
23.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SEKRETARIAT
24.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
25.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOPIDO BAGIAN TATA USAHA
26.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PERHUBUNGAN SEKRETARIAT
27.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN PEMERINTAHAN
28.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS TRANSMIGRASI SEKRETARIAT
29.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL SEKRETARIAT
30.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PERDAGANGAN SEKRETARIAT
31.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 TEKNIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
32.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 TEKNIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SEKRETARIAT
33.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH
34.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
		PERTANIAN		
35.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM
36.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SEKRETARIAT
37.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SEKRETARIAT
38.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 PENDIDIKAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT
39.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 TEKNIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG SUMBER DAYA AIR
40.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
41.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	2	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS SOSIAL SEKRETARIAT
42.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
43.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI SEKRETARIAT DPRD BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG - UNDANGAN
44.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 TEKNIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKRETARIAT
45.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PARIWISATA SEKRETARIAT
46.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN ORGANISASI
47.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	2	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
48.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
49.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK SEKRETARIAT
50.	PENATA LAYANAN	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
	OPERASIONAL	MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 TEKNIK		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
51.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SEKRETARIAT
52.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP SEKRETARIAT
53.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT
54.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 PENDIDIKAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR
55.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
56.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI KECAMATAN LAMPASIO SEKRETARIAT
57.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI SEKRETARIAT DPRD BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
58.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT
59.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKRETARIAT
60.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PERIKANAN SEKRETARIAT
61.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI KELURAHAN TUWELEY SEKRETARIAT
62.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEKRETARIAT
63.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEKRETARIAT
64.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP SEKRETARIAT
65.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI KELURAHAN NALU SEKRETARIAT
66.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI KELURAHAN BARU SEKRETARIAT
67.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI KECAMATAN DONDO SEKRETARIAT
68.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SEKRETARIAT
69.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI KECAMATAN BASIDONDO SEKRETARIAT
70.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIAT
71.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN PEMERINTAHAN
72.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
73.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT
74.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT
75.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI KECAMATAN OGODEIDE SEKRETARIAT
76.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI KECAMATAN DAMPAL UTARA SEKRETARIAT
77.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KESEHATAN SEKRETARIAT
78.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
79.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	ADMINISTRASI UMUM BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SEKRETARIAT
80.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
81.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK SEKRETARIAT
82.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SEKRETARIAT
83.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SEKRETARIAT
84.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT
85.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI KECAMATAN GALANG SEKRETARIAT
86.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
87.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKRETARIAT
88.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI KELURAHAN PANASAKAN SEKRETARIAT
89.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI KECAMATAN TOLITOLI UTARA SEKRETARIAT
90.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	3	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI BADAN PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIAT
91.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH SEKRETARIAT
92.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN ORGANISASI
93.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAHA SEKRETARIAT
94.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS TRANSMIGRASI SEKRETARIAT
95.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI KELURAHAN SIDOARJO SEKRETARIAT
96.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PERDAGANGAN SEKRETARIAT
97.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM
98.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SEKRETARIAT
99.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS TENAGA KERJA SEKRETARIAT
100.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT
101.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI KECAMATAN DAMPAL SELATAN SEKRETARIAT
102.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS SOSIAL SEKRETARIAT
103.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN SEKRETARIAT
104.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI KECAMATAN BAOLAN SEKRETARIAT
105.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN HUKUM
106.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SEKRETARIAT
107.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PERINDUSTRIAN SEKRETARIAT
108.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT
109.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI KECAMATAN DAKO PEMEAN SEKRETARIAT
110.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI INSPEKTORAT DAERAH SEKRETARIAT
111.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI KELURAHAN TAMBUN SEKRETARIAT
112.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
113.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PARIWISATA SEKRETARIAT
114.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS KETAHANAN PANGAN SEKRETARIAT
115.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PERHUBUNGAN SEKRETARIAT
116.	PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PERTANIAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PERDAGANGAN BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
117.	PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PERTANIAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PERDAGANGAN BIDANG KEMETROLOGIAN
118.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SLTP/SMP SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PERHUBUNGAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
119.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR	5	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN
120.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SLTP/SMP SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS PERDAGANGAN UPT. PASAR DINAS PERDAGANGAN
121.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SLTP/SMP SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI KECAMATAN BAOLAN SEKRETARIAT
122.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SLTP/SMP SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI BADAN PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIAT
123.	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN ; S-1 MEKANISASI PERTANIAN ; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN ; S-1 TEKNIK PERTANIAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 AGROTEKNOLOGI	5	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN
124.	PRANATA TRANTIBUM	SLTA/SMA SEDERAJAT	4	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
125.	PRANATA TRANTIBUM	SLTA/SMA SEDERAJAT	3	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
126.	PRANATA TRANTIBUM	SLTA/SMA SEDERAJAT	3	PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

